



DPRD Melawi Surati Bupati

NANGA PINOH, SP - DPRD Melawi sudah menyurati Bupati Panji untuk segera menyampaikan KUA PPAS RAPBD Perubahan Melawi Tahun Anggaran 2019.

Di sisa masa bakti anggota DPRD Melawi ini, diharapkan pembahasan APBD Perubahan bisa tuntas sebelum pelantikan dewan baru di awal September mendatang.

Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi, Selasa (6/8) mengungkapkan, DPRD memang sudah melayangkan surat ke Pemkab Melawi untuk bisa segera menyampaikan draf KUA PPAS RAPBD Perubahan.

"Walau memang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum keluar, kami kira tak menjadi masalah, bila Pemda menyampaikan draf KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2019 ke DPRD, sambil menunggu LHP ini disampaikan oleh bupati," katanya.

Surat dari DPRD tersebut, lanjut Iif, sebenarnya untuk mengingatkan Pemkab Melawi di mana sesuai jad-

wal, penyampaian KUA PPAS RAPBD. Perubahan tahun berjalan disampaikan paling lambat minggu pertama Agustus.

"Sesuai dengan aturan, bahwa penyampaian KUA PPAS RAPBD Perubahan dilakukan pada minggu pertama Agustus. Kita ingin agar pembahasan anggaran bisa berjalan tepat waktu," terangnya.

Dengan masa bakti anggota DPRD Melawi Periode 2014-2019 yang akan habis, Iif meyakini bahwa pembahasan APBD perubahan masih sangat memungkinkan dilakukan oleh DPRD saat ini.

Dengan waktu tersisa kurang lebih satu bulan saja, Iif menilai ketuk palu APBD Perubahan dapat saja terlaksana, tanpa harus menunggu pelantikan dewan baru.

"Yang penting, Pemkab dan DPRD sama-sama punya niat untuk menyelesaikan itu," katanya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji, ditemui sejumlah awak media memastikan akan menyampaikan

draf APBD Perubahan tahun 2019. Namun Pemkab masih akan menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Melawi tahun anggaran 2018.

"Setelah hasil audit ini sampai, maka kita segera sampaikan APBD Perubahan. Tidak kita mengacu bahwa yang sudah-sudah ini sering terlambat. Tapi kalau kita kompak dan cepat, tidak banyak hiruk pikuknya, APBD perubahan itu masih sangat mungkin," ungkapnya.

Panji juga berharap, APBD perubahan pada 2019 ini tetap ada dan dapat dibahas. Persoalan peralihan masa jabatan anggota DPRD Melawi tidak terlalu mengganggu selama semua pihak mau kompak dan pembahasan bisa berjalan baik serta tak menyalahi aturan, maka bisa saja dibahas pada periode DPRD berjalan saat ini.

"Kalau pembahasannya memperhatikan kepentingan masyarakat, sampai September mendatang masih cukup. Masih ada satu bulan," katanya. **(eko/lha)**